

**IMPLEMENTASI DISKUALIFIKASI CALON
KEPALA DAERAH DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH**
(Studi kasus pada KPU di Kabupaten Lampung Timur)



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah



Oleh :

ALICIA DARMA KESUMA
NPM. 1321020024

Program Studi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara Islam)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2019 M

**IMPLEMENTASI DISKUALIFIKASI CALON
KEPALA DAERAH DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH**

(Studi Kasus pada KPU di Kabupaten Lampung Timur)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah**

Oleh



**ALICIA DARMA KESUMA
NPM. 1321020024**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
Pembimbing II : Eko Hidayat, S. Sos. MH.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
2019 M**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI DISKUALIFIKASI CALON KEPALA DAERAH DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH

(Studi Kasus pada KPU di Kabupaten Lampung Timur)

Oleh

Alicia Darma Kesuma

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pemilihan Kepala Daerah bentuk sebuah demokrasi yang bertujuan untuk mendapatkan Pemimpin Daerah yang diinginkan oleh masyarakat. dalam pemilihan kepala daerah banyak terjadi permasalahan seperti halnya yaitu diskualifikasi pasangan calon kepala daerah Lampung Timur Erwin Arifin dan Prio Budi Utomo oleh KPU Lampung Timur karena wakilnya berhalangan tetap (meninggal dunia), keputusan KPU Lampung Timur dalam menggugurkan pasangan calon kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan (5) dan . Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 9 Tahun 2015 Pasal 83 ayat (1) dan (2). Yaitu apabila terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, tetapi masih ada dua pasangan calon atau lebih, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota tetap melanjutkan tahapan pemilihan, dan pasangan calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan diskualifikasi calon kepala daerah di Lampung Timur pada tahun pemilihan 2015 dan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap diskualifikasi calon kepala daerah di Lampung Timur, Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan diskualifikasi calon kepala daerah di Lampung Timur pada tahun pemilihan 2015 dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris yuridis. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses editing, coding dan rekonstruksi data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Data dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat, Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lampung Timur Nomor: 56/Kpts/KPU.Kab-008.435605/2015 Tentang Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015. Diskualifikasi pasangan calon Kepala Daerah Erwin Arifin dan Priyo Budi Utomo, dalam hal ini sudah sesuai yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 9 Tahun 2015 Pasal 83 ayat (1) dan (2). Dalam tinjauan Fiqh Siyasah apabila seorang Khalifah atau Imamah wafat atau dicopot dari jabatannya, maka wajib untuk menggantikannya, dan diperintahkan untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri apa yang telah menjadi keputusannya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Alicia Darma Kesuma

NPM : 1321020024

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara Islam)

Fakultas : Syari'ah

**Judul : IMPLEMENTASI DISKUALIFIKASI CALON
KEPALA DAERAH DI TINJAU DARI FIQH
SIYASAH (Studi Kasus pada KPU di Kabupaten
Lampung Timur)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zubraini, S.H., M.H.

NIP. 196505271992032002

Eko Hidayat, S. Sos. MH.

NIP. 197512302003121002

Ketua Jurusan Siyasah

Drs. Susiadi, M.Sos.I

NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI DISKUALIFIKASI CALON KEPALA DAERAH DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI KASUS PADA KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)", disusun oleh Nama: Alicia Darma Kesuma NPM. 1321020024, Program Studi : Siyasah syar'iyah (Hukum Tata Negara islam), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Kamis/ 23 Mei 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. (.....)

Sekretaris : Kartika S, M.Pd (.....)

Penguji I : Drs. Hendry Iwansyah, M.A. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhairini, S.H., M.H. (.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung**

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP.197009011997031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah Ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik (akibatnya). (Q.S An-Nisa : 59)¹



¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penerbit Diponegoro, Bandung, 2009, hlm. 87

PERSEMBAHAN

Dengan ini segala syukur kepada Allah yang Maha Esa dan atas dukungan dan doanya akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda Syaiful Indra. BB.A. dan Ibunda Hermawati yang senantiasa dan tiada henti-hentinya mendukung, menyayangi, menemaniku dan membantuku serta mendo'akan keberhasilanku, membesarkanku dengan do'a dan jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku. Aku semakin yakin bahwa ridha Allah SWT adalah keridhaanmu.
2. Keluargaku Kakek Ali Bantan Nurfi'ah dan, Paman dan dan abangku tersayang, Erlangga Nandiya Kesuma S.H., Sertu Pebri Hendro, Kakak Citra Nindiya Kesuma S.Pt, Lingga Kesuma Wardani S.Pt., Kurnia Anggara Kesuma S.T., yang telah membantu materil maupun moril dan yang telah memberikan semangat disetiap saat, semoga Allah juga kabulkan mimpi, cita-cita kita. Dan kita bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan.
3. Seluruh dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan tulus ikhlas. Dan Almamater Tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Alicia Darma Kesuma dilahirkan di Way Jepara pada tanggal 14 Januari 1995, merupakan anak ke Enam dari Enam bersaudara putra pasangan Bapak Syaiful Indra dan Ibu Hermawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan di:

1. TK Baitul Muslim , Way Jepara diselesaikan tahun 2000.
2. MIN Braja Sakti Way Jepara, Lampung Timur diselesaikan tahun 2007.
3. SMPN I Way Jepara, Lampung Timur diselesaikan tahun 2010.
4. Kemudian melanjutkann di SMK TI Bhima Sakti Way Jepara Lampung Timur Jurusan Telekomunikasi Dan Jaringan (TKJ) dan lulus pada tahun 2013.
5. Tahun 2013, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Falkutas Syari'ah dan Hukum pada Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara) melalui jalur Seleksi Penelusuran Minat Akademik (PMA).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WR.WB

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran, serta tak lupa penulis haturkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Ketentuan Diskualifikasi Calon Kepala Daerah di Tinjau Fiqh Siyasah (Studi pada KPU di Kabupaten Lampung Timur)”.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 di jurusan Jinayah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan perasaan terdalam kepada semua orang yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini,. Kepada mereka, dengan segenap kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan rasa bangga dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Mukri, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

2. Dr. Alamysh, S. Ag. M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Drs. Susiadi, AS., M. Sos. I. selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Eko Hidayat, S. Sos. MH. selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Teman-teman Siyasah angkatan 2013, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas kebersamaan perjuangan selama ini.
7. Orang-orang yang mendukung Aswan, Eva, Evi dan terkhususnya orang paling spesial Sinta Eldina.
8. Keluarga Besar TNI AD Korem 043 yang selalu memberi izin, meminjamkan kendaraan, uang dan dukungan, terkhususnya Serka Mudo Setiawan (Selaku Batih Kompi A), Koptu Agus Prasajo.
9. Kepada seluruh staff maupun ketua KPU Lampung Timur terimakasih atas kerjasamanya yang selalu membantu dalam penelitian maupun wawancara dalam skripsi ini,

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis tetap berharap semoga kripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam proses menerapkan nulis dapatkan di bangku kuliah, semoga skripsi mampu memba ilmu pengetahuan. Untuk lebih menyempurnakan skripsi ini dimasa mendatang penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dengan harapan agar dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Bandar Lampung, 26 Febuari 2019



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemilihan Pemimpin Dalam Kontek Fiqh Siyasah	17
1. Fiqh Siyasah	17
2. Siyasah Dusturiyah	20
3. Kedudukan Imamah di Negara Dalam Islam.....	24
4. Mekanisme Pemilihan Imamah Dalam Siyasah Dusturiyah	29
B. Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pemilihan Kepala Daerah	40
1. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.....	40
2. Pengertian dan Tujuan Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Menurut UU No. 8 Tahun 2015	41

3. Dasar Hukum Diskualifikasi Calon Kepala Daerah.....	43
4. Mekanisme Diskualifikasi Calon Kepala Daerah.....	45

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Profil Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur	48
1. Sejarah Pembentukan KPU Kabupaten Lampung Timur	48
2. Susunan Organisasi	56
3. Visi dan Misi KPU Kabupaten Lampung Timur	57
4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Lampung Timur	58
B. Diskualifikasi Calon Kepala Daerah di KPU Lampung Timur Penyelesaiannya.....	63
1. Alasan – Alasan Diskualifikasi Calon Kepala Daerah di KPU Lampung Timur.....	63
2. Tujuan Diskualifikasi Calon Kepala Daerah di KPU Lampung Timur	65
3. Mekanisme Diskualifikasi Calon Kepala Daerah di KPU Lampung Timur.....	66

BAB IV ANALISIS

A. Pelaksanaan Diskualifikasi Calon Kepala Daerah di Lampung Timur	70
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Diskualifikasi Calon Kepala Daerah di Lampung Timur.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Sebelum menguraikan isi skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan judul yang tertara pada proposal ini yaitu “**Implementasi Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah**”

1. **Diskualifikasi** adalah larangan untuk bertanding atau berkompetisi bagi seseorang atau sebuah regu yang melanggar aturan-aturan yang menyatakan tidak cakap atau tidak mampu, pencabutan hak, dan hal yang tidak memenuhi syarat.²
2. **Kepala daerah** adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintahan di daerah, memimpin dan bertanggung jawab secara penuh dalam penyelenggaraan segala sesuatu hal yang berjalan di daerah.³
3. **Fiqh siyasah** menurut Abd Wahab fiqh siyasah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid.⁴

² Peter Salim Dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 1999), h. 75.

³ A. Rahman H.I, *Sistem Politik di Indonesia*, (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2007), h. 147.

⁴ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah*,(Jakarta: Kencana, 2007), h. 30.

“Implementasi Diskualifikasi Calon Kepala Daerah di Tinjau Fiqh Siyasah” adalah memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi tentang suatu ketetapan atau ketentuan dalam aturan pemilihan umum kepala daerah yang apabila salah satu atau beberapa calon yang melanggar peraturan atau tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah akan dicabut haknya untuk bertanding atau berkompetisi dalam pemilu yang ditinjau dari fiqh siyasah.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah:

1. Alasan objektif

Kajian ini untuk mengetahui tata cara pelaksanaan diskualifikasi calon kepala daerah yang terjadi di KPU lampung timur, hal ini disebabkan karena sebuah negara demokrasi mempunyai hak politik seseorang dalam pencalonan pada pemilihan umum. Untuk memahami dan memperluas wawasan terkait masalah pelaksanaan diskualifikasi calon kepala daerah dan menambah pemahaman tinjauan fiqh siyasah terhadap perdiskualifikasian tersebut.

2. Alasan subjektif

Pembahasan ini diangkat karena belum ada yang membahas pembahasan ini di UIN raden intan lampung, dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk di bahas dan diteliti karena tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

C. Latar Belakang Masalah

Hak kewarganegaraan menjadi suatu yang penting dalam pemerintahan Islam, dalam Hukum Islam sendiri pemilihan kepala daerah tidak ada diatur secara khusus dikarenakan kepala daerah dimasa klasik tidak dipilih melainkan diangkat atau ditunjuk oleh khalifah. Namun demikian Islam memiliki prinsip-prinsip pokok yang dapat digunakan sebagai pedoman dengan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.

Allah SWT berfirman⁵:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah Ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik (akibatnya). (Q.S An-Nisa : 59)

Dalam Ayat diatas Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri. Ulil amri sendiri dalam Ayat tersebut adalah pemegang urusan pemerintahan, yakni para wali yang menjabat sebagai penguasa wilayah semacam wali kota, maupun gubernur. Urusan ketaatan kepada penguasa dalam perspektif Islam tersambung

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* , Penerbit Diponegoro, Bandung, 2009, hlm. 87

dengan ketaatan kepada Allah dan RasulNya. Artinya, politik pemerintahan dunia tidak terpisah dengan ajaran Islam yang berdimensi dunia akhirat. Siapapun muslim, baik sebagai rakyat maupun penguasa tidak boleh memisahkan urusan politik dengan urusan agama Islam.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Q.S Al Imran:159)⁶

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, salah satu ciri negara hukum adalah adanya sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Penyelenggaraan sistem demokrasi negara harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam kehendak umum yaitu kehendak bersama semua individu sebagai satu bangsa yang

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung : Penerbit Diponegoro, 2009), h. 71.

mengarah pada kepentingan bersama atau kepentingan umum, sehingga undang-undang harus mencerminkan kepentingan umum yang ditetapkan secara langsung oleh rakyat dalam suatu pertemuan (demokrasi langsung).

Demokrasi menjadi salah satu hal penting dalam konteks kehidupan politik di Indonesia, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung merupakan salah satu sarana mewujudkan kehidupan politik yang demokratis.⁷ Menurut Mahfud M.D ada dua alasan dipilihnya demokrasi menjadi dasar dalam bernegara. *Pertama*, hampir seluruh negara didunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan yang esensial telah memberikan arah bagi **peranan** masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tinggi.⁸

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu dan pilukada. Dalam

⁷ Hartuti Purwaneni, *Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 3, 2004, hlm. 123

⁸ A. Ubaidillah dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta Press, 2000), h. 161.

penyelenggaraan pemilu, komisi pemilihan umum (KPU) bertugas melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu).

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 juncto Nomor 8 Tahun 2015, yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selanjutnya perubahan diatur yang di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, salah satu tugas pokok dari lembaga ini adalah memberikan laporan pertanggung jawaban dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya kepada Presiden bukan kepada rakyat yang seharusnya pemilu merupakan hajatan rakyat maka pertanggung jawaban pelaksanaan pemilu seharusnya pada rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan terjadinya diskualifikasi calon bupati di Lampung Timur. Andri Oktavia sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa langkah yang diambil oleh KPU Lampung Timur dengan menggugurkan calon bupati Erwin Arifin, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pilkada, tahun pemilihan 2014-2015 yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 54 Ayat (1),⁹

Dalam PKPU tersebut, menyebut, apabila ada pasangan calon yang berhalangan tetap, dan masih terdapat dua pasangan calon atau lebih, maka pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat atau dihapus dalam pelaksanaan Pilkada, Status Erwin Arifin sebagai calon bupati Lampung Timur gugur,” kata Andri Oktavia, Ketua KPU Lampung Timur, Menurut Andri, keputusan itu merupakan hasil rapat pleno KPU Lampung Timur (10/11/2015), setelah pihaknya melakukan kajian atas aturan dan undang-undang berkaitan pencalonan Erwin Arifin setelah calon wakilnya, Prio Budi Utomo, meninggal dunia pada Rabu (4/11/2015). Andri menjelaskan, dasar keputusan itu adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 83 Ayat 1 pemilihan umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pasal 83 Ayat 1 menyatakan apabila sejak kampanye 27 agustus 2015 sampai 5 desember 2015 terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, tetapi masih ada dua pasangan

⁹ <https://lampung.antaranews.com/berita/286001/akhirnya-pencalonan-erwin-arifin-gugur>

calon atau lebih, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota tetap melanjutkan tahapan pemilihan. Lalu, Ayat 2 Pasal itu menyatakan, calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan calon atau pasangan calon pengganti.

Adanya ketentuan tersebut telah membuat Erwin Arifin selaku calon bupati Lampung Timur digugurkan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur Sebab, Calon Bupatinya Priyo Budi Utomo meninggal dunia saat masa kampanye. “Kenyataannya, Erwin Arifin harus dinyatakan gugur melalui SK KPUD atau SK KPU kabupaten Lampung Timur Nomor: 56/Kpts/KPU.Kab-008.435605/2015 pada tanggal 10 November 2015. akibat dari ketentuan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 9 tahun 2015, hasil rapat pleno pada Selasa 24 November 2015 dalam sidang perkara nomor 140/PUU-XIII/2015 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Konsekuensi atas keputusan digugurkan pencalonan Erwin Arifin dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur ini, pilkada Lampung Timur hanya diikuti dua pasangan calon bupati-wakil bupati, yakni nomor urut 1 pasangan Yusran Amirullah S.E dan Drs. Sudarsono M.Si yang diusung oleh Partai NasDem, Partai Gerindra, dan Partai Golkar lalu nomor urut dua pasangan Chusnunia M.Si, MKn dan Zaiful Bukhari ST, MM. yang di usung partai kebangkitan bangsa (PKB) dan partai Demokrat.

¹⁰ <https://www.merdeka.com/politik/digugurkan-karena-wakilnya-meninggal-cabup-lampung-timur-meradang.html>

Berdasarkan alasan diatas maka penulis mengambil judul “Ketentuan Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Ditinjau Fiqh Siyasah (Study Pada KPU di Kabupaten Lampung Timur”

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan diskualifikasi calon kepala daerah di Lampung Timur pada tahun pemilihan 2015 ?
2. Bagaimana tinjauan dari fiqh siyasah terhadap diskualifikasi calon kepala daerah di Lampung Timur ?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan diskualifikasi calon kepala daerah di Lampung Timur pada tahun pemilihan 2015
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap diskualifikasi calon kepala daerah di Lampung Timur

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi awal bagi para pihak yang berminat untuk mengkaji masalah ini sekaligus untuk memahami hazanah pengembangan ilmu pengetahuan tentang pelanggaran, khususnya yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang diskualifikasi calon kepala daerah, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan diskualifikasi calon kepala daerah menurut Islam di lingkungan akademis perguruan tinggi.

b. Kegunaan Secara Praktis

1. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya khususnya bagi penelitian penyelesaian diskualifikasi calon kepala daerah.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah di bidang pemilihan kepala daerah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang akan dilakukan dilapangan dalam kancah yang sebenarnya¹¹, penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu berupa wawancara (*interview*) untuk

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993), h. 03.

mendapatkan informasi terhadap anggota KPU kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Dalam membahas permasalahan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan antara lain :

a. Pendekatan secara yuridis normatif adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang ada dan berhubungan dengan permasalahan yang akan yang akan dibahas.

b. Pendekatan secara empiris yuridis adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan,¹² yaitu menemukan ketentuan diskualifikasi calon kepala daerah oleh KPUD Lampung Timur.

Dengan mengadakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu memperoleh gambaran dan faktor dalam menemukan ketentuan-ketentuan apa saja yang dilakukan KPUD Lampung Timur terhadap pendiskualifikasian calon kepala daerah dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penyelesaian diskualifikasi calon kepala daerah.

¹² Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data yaitu :

1. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan diskualifikasi calon kepala daerah yang terjadi di Lampung Timur pada tahun pemilihan 2014-2015, Data ini diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijaksanaan wawancara, namun masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah disiapkan secara seksama dengan pembahasan oleh pewawancara.¹³

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada diluar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang.¹⁴

Yaitu Al-Qur'an dan hadist, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, buku-buku, makalah-makalah, majalah artikel internet dan sumber-sumber yang berkenaan dengan penelitian ini.

4. Populasi

Menurut Sugiyono, Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵ Populasi yang diteliti dalam

¹³ Cholid Narbuto, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 83.

¹⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Jakarta : Alfabeta, 2009), h. 225.

¹⁵ *Ibid*, hlm 112

penelitian ini adalah warga, dan staff komisi pemilihan umum (KPU) Lampung Timur.

5. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili karakteristik populasi dalam penelitian. Sampel mempunyai cakupan lebih kecil daripada populasi. Untuk mendapatkan sampel, maka digunakanlah tehnik pengambilan sampel atau sering disebut dengan sampling.

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode sampling *purposive*. Menurut Sugiyono Sampling *purposive* adalah tehnik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.¹⁶ Teknik ini dilakukan sebagai sebuah tehnik yang secara sengaja mengambil sampel yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang di butuhkan.¹⁷ Pada penelitian tentang pemilu, dengan mempergunakan seseorang yang telah dewasa sebagai sampling, meliputi anggota KPU beserta staffnya. Peneliti mengumpulkan data secara langsung dengan mewawancarai khususnya staff anggota KPU Lampung Timur yang ditemui tiga narasumber diantaranya, Ketua KPU Lampung Timur, Andri Oktavia, S.Si, Sekertaris KPU Lampung Timur, Mashur Sampurna Jaya S.STP., M.Si., Kasubbag Hukum KPU Lampung Timur, Febra Oka Mehendara, S.H.

¹⁶ *Ibid*, hlm 60

¹⁷ Margono *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm

6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer melalui wawancara dengan responden, menanyakan langsung kepada informan atau pihak yang kompeten dalam permasalahan terkait dengan diskualifikasi calon kepala daerah yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur.

2. Pengumpulan data sekunder

Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode penggunaan bahan dokumen, karena peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak lain.¹⁹ Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya. Pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian serta

¹⁸ Sugiarto, dkk, *Tekhnik Sampling* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 16.

¹⁹ *Ibid*, hlm 19

dengan melihat keterangan tentang penyelesaian diskualifikasi calon kepala daerah di Kabupaten Lampung Timur.

b. Metode Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara antara lain :

a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, sesuai, atau relevan dengan masalah.²⁰

b. Koding, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori,²¹ atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data atau urutan rumusan masalah.

c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematis data (*sistemizing*) yaitu penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Analisis Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data

²⁰ Cholid Narbuto, *Op., Cit*, hlm. 153

²¹ *Ibid*, hlm 115

deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.²²

Analisis deskriptif kualitatif ini digunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif.²³

Metode ini dilaksanakan dengan cara menganalisa data-data yang ada dilapangan baik yang berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi (benar terjadi) dalam hal ini fakta dalam penyelesaian pelanggaran pemilu kepala daerah. Kemudian dari fakta yang khusus dan konkrit ditarik generalis yang mempunyai sifat umum.



²² Suharsini Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), h. 29.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT Rineka Cipta 1993), h. 282.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemilihan Pemimpin dalam Kontek Fiqh Siyasah

1. Fiqh Siyasah

Secara harfiyah (leksikal), fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam Lisan al-'Arab. Menurut istilah, fiqh (fikih) adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.²⁴

Fiqh juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad. Kata siyasah bersal dari akar kata ساس- سياسة yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan²⁵. Di dalam Kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab, kata siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.²⁶

Menurut Abd Wahab Siyasah syar'iyyah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan

²⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 28

²⁵ Muhammad Abu Zahra, Saifuddin. "prospek hukum islam dalam system hukum Indonesia". (jurnal Al-'Adalah Vol. XIV, No. 2 (2007) *Usul Al-Fiqh* (Cairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 55. Al-'Adalah by <http://ejournal.radenintan.ac.id/>, (03 febuari 2019, 15:35)

²⁶ *Ibid*, h. 29

kemaslahatan dan menghindari kemadaran (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid.²⁷

Menurut Abd al-Rahman Taj, siyasah syar'iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kully), untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Siyasah syar'iyah mengisyaratkan dua unsur penting yang berhubungan secara timbal balik (kontrak sosial), yaitu 1). Penguasa atau yang mengatur dan 2). Rakyat atau warga negara. Dilihat dari norma-norma pokok yang terlibat dalam proses siyasah syar'iyah ini, ilmu ini layak masuk kategori ilmu politik. Hal ini sejalan dengan sinyalemen Wiryo Prodjodikoro:²⁸ "Dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang perintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat". Pola siyasah syar'iyah dan politik memiliki kemiripan jika dilihat secara umum. Akan tetapi jika diperhatikan dari fungsinya mengandung peredaan. Menurut Ali Syari'ati siyasah syar'iyah memiliki fungsi ganda yaitu khidmah (pelayanan) dan islah (arahan/bimbingan), sedangkan politik berfungsi hanya untuk pelayanan (khidmah) semata-mata. Kemudian siyasah dilihat dari modelnya dibagi atas

²⁷ *Ibid*, h. 30

²⁸ Wiryo Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. (Bandung : Eresco, 1971), h. 34

dua macam. A) Siyasah syar'iyah; siyasah yang berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan (syari'at) atau model politik yang dihasilkan oleh pemikiran

manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara b). Siyasah wadh'iyah; siyasah yang didasarkan atas pengalaman sejarah maupun adat istiadat atau semata-mata dihasilkan dari akal pikir manusia dalam mengatur hidup bermasyarakat maupun bernegara. Meskipun aplikasi siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah mengandung perbedaan, tentu saja tidak harus diklaim bahwa siyasah syar'iyah harus diberlakukan di negara-negara yang mayoritas muslim. Karena dalam pengalaman empiris, dapat terjadi siyasah wadh'iyah dapat diterima oleh kaum muslimin, seperti Indonesia.

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intrin suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstrin antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan. Berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, dibedakan : *Pertama, Fiqh siyasah dusturiyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lainnya dalam batas-batas administrasi suatu negara. *Kedua, Fiqh siyasah dauliyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara

dan lembaga negara dari negara lain. *Ketiga, Fiqh siyasah Maliyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.²⁹

2. Siyasah Dusturiyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³⁰

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³¹

Sedang kata “dusturi” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota

²⁹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat...*, *Op.Cit.* h. 31.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 3.

³¹ *Ibid*, h. 4.

masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).³²

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan yang dijelaskan *sunnah* Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.³³

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyasah* akan tercapai.

Atas hal-hal di ataslah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang

³² *Ibid*, h. 154

³³ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, h. 46-47.

lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Sumber-sumber Fiqh Dusturiyah :

- a. Al-Qur'an, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat.
- b. Al-hadits, terutama hadits-hadits yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasul SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab.
- c. Kebijakan-kebijakan Khulafau Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan, meskipun mereka mempunyai perbedaan didalam gaya pemerinyahannya sesuai dengan pembawaan sifat dan wataknya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu Reorientasi.
- d. Ijtihad ulama didalam mencapai kemaslahtan umat, misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.
- e. Adat kebiasaan suatu bangsa, yang tidak beretentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadits. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang disebut konversi.³⁴

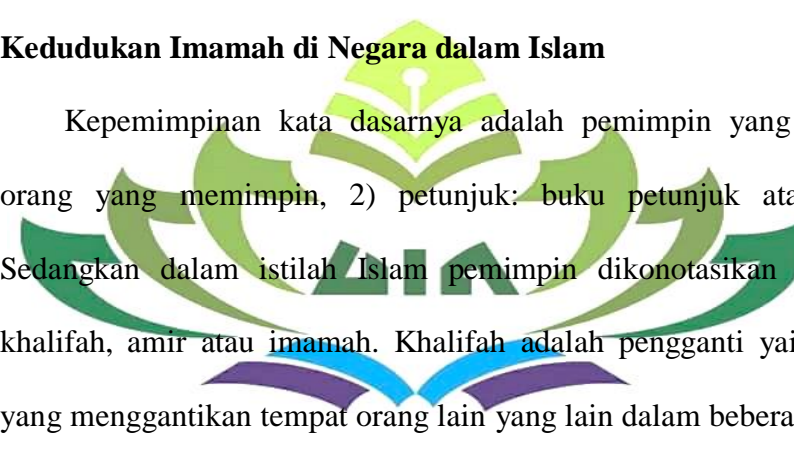
Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqosid al-Syariah; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat.

³⁴ Muchtar Affandi, *ilmu-ilmu kenegaraan*, (Alumni : Bandung, 1971), h. 157.

Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁵

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad³⁶ Asad, al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.

3. Kedudukan Imamah di Negara dalam Islam



Kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin yang berarti : 1) orang yang memimpin, 2) petunjuk: buku petunjuk atau pedoman. Sedangkan dalam istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan kata khalifah, amir atau imamah. Khalifah adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi " titel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat Muslim sebagai gelar yang berlabel agama".³⁷

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, *Op.Cit.* h. 48

³⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta; Balai Pustaka, 2001, Cet. I), h. 874.

³⁷ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Cet III, 1997, Ed. I), h. 48-49.

Imamah berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului dan Amir mempunyai arti pemimpin (*Qaid Zaim*) dan dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.³⁸ Sedangkan menurut AI-Taftazani yang telah dikutip oleh Dhiauddin Rais, dalam bukunya yang berjudul " Teori Politik Islam ", keimamahan didefinisikan sebagai kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan agama. Sebagai khalifah atau wakil dari Nabi saw.

Keimamahan negara yang berasal dari imam ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

1. Kepemimpinan yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja pada bidang umum. Mereka dimaknai dengan sebutan menteri. Mereka menerima kekuasaan untuk mengerjakan tugas-tugas yang tidak ditentukan bentuknya.
2. Yang mempunyai kekuasaan umum dan bekerja di daerah - daerah khusus, mereka dinamai dengan nama gubernur daerah. Mereka berwenang dalam semua urusan yang ada di daerahnya yang menjadi tanggung - jawabnya.
3. Yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang regional yang umum seperti *Qadhi*, komandan militer, kejaksaan, pengatur perpajakan, pembagi sedekah.

³⁸ *Ibid.* h. 63.

4. Yang mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang khusus seperti *Qadhi* daerah, komandan militer daerah, kejaksaan daerah, pengatur perpajakan daerah, pembagi sedekah daerah.³⁹

Secara hirarkis kepemimpinan negara meliputi hal-hal sebagai berikut ; kementerian ke gubernuran, kehakiman, kemiliteran, keuangan ditambah jabatan - jabatan lain yang berada di setiap daerah, yaitu kehakiman daerah, keamanan daerah dan keuangan daerah. Kepemimpinan dipahami dalam dua pengertian yaitu sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Ada tiga implikasi penting yang terdapat dalam kepemimpinan untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktifitas - aktifitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompoknya yaitu : 1) kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik bawahan atau pengikutnya, 2) kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, 3) adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai kekuasaan yang berbeda - beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya.⁴⁰

Dalam istilah lain pemimpin sering merujuk pengertian Ulil Amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan Khadimul Umat (pelayan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat. Sedangkan kepemimpinan sendiri mempunyai arti perihal

³⁹ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta; Gema Insani Perss, 2001, Cet. I), h. 209-210.

⁴⁰ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*,

pemimpin : cara memimpin.⁴¹

Kepemimpinan atau sering disebut dengan leadership adalah kemampuan seseorang yaitu pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang lain yaitu yang dipimpin / pengikutnya sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut.⁴²

Kepemimpinan terbagi dalam 2 bentuk yaitu :

a. Formal (pemimpin yang resmi)

b. Informal (pemimpin yang tak resmi)

Formal atau pemimpin yang resmi adalah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya dan untuk mencapai sasaran organisasi. Pendekatannya lebih banyak bersumber dari atas. Pemimpin formal (formal leader) ini lazimnya dikenal dengan istilah " Kepala ".⁴³ Sedangkan pemimpin informal atau tak resmi adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, bisa mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan prilaku suatu kelompok atau masyarakat.

⁴¹ K.H. Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung S.Si, MM, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta; Gema Insani Perss, 2003), h., 120.

⁴² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1994, Cet. 18), h. 80.

⁴³ EK. Imam Munawir, *Asas – Asas Kepemimpinan dalam Islam*, (Surabaya; Usaha Nasional), h. 94.

Dan mempunyai ruang lingkup tanpa batas-batas resmi karena kepemimpinan demikian di dasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat tidak nyata terlihat dalam hirearkis, juga tidak terlihat dalam gambar. Dalam kalangan Islam maka kepemimpinan informal mendapat tempat yang tersendiri dihati umat, misalnya dengan banyaknya ulama', Ustadz, dan Zuama. Mereka memiliki pengikut yang tak kalah banyak jumlahnya dengan pemimpin formal.

Kadang kala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai proses sosial. Sebagai kedudukan kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban - kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan atau lembaga. Sedangkan sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.⁴⁴ Jabatan pemimpin tidaklah menjadikan seseorang menjadi seorang pemimpin sebab sesudah menjadi pemimpin sebuah kelompok, banyak yang harus diperbuat agar seorang pemimpin diterima oleh anggota kelompok dan dapat mempengaruhi prilaku kinerja mereka.

Secara sosiologis seorang pemimpin harus mempunyai sandaran – sandaran kemasyarakatan atau social basic serta mencakup susunan masyarakat serta cultural focus masyarakat yang bersangkutan. Sementara calon pemimpin adalah orang yang dapat memimpin orang lain kearah pencapaian tujuan organisasi dan dapat menjalin komunikasi antar

⁴⁴ Soejono Soekanto, *Op. Cit.* h. 330-331.

manusia karena organisasi itu selalu bergerak atas dasar interaksi antar manusia.

Kepemimpinan umat adalah amanah yang tidak dapat lepas dari prinsip akhlak faktor moral atau etika umat menentukan pembinaan kepemimpinan umat. Sehubungan dengan itu, maka pada prinsipnya setiap pemimpin perlu memiliki kelebihan tertentu dalam sifatnya sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa.
- b. Kelebihan jasmani dan rohani.
- c. Berilmu pengetahuan.
- d. Berani.
- e. Jujur.
- f. Hikmah.
- g. Memiliki akhlak mahmudah dan menghindari akhlak yang madzmumah.
- h. Lapang dada.
- i. Penyantun dan penyayang.
- j. Ikhlas dan rela berkorban.⁴⁵



⁴⁵ Hamzah Ya'kub, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah Suatu Pengantar*, (Bandung; CV.Diponerogo, 1996, Cet. II), h. 165-167.

4. Mekanisme Pemilihan Imamah dalam Siyasah Dusturiyah

Agama tidak mungkin tegak tanpa jama'ah. Tidak tegak jama'ah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada pemimpin melainkan dengan ketaatan. Al- Hasan al-Bashri pernah mengatakan, “mereka memimpin lima urusan kita, Shalat Jum'at, shalat jama'ah, shalat Ied, perbatasan negara, dan penetapan sanksi hukum. Demi Allah, tidak akan tegak agama tanpa mereka, kendati mereka melakukan maksiat atau berlaku zalim.”⁴⁶

Menegakkan Imamah merupakan salah satu kewajiban paling agung dalam agama, sebab manusia butuh persatuan dan saling membantu satu sama lainnya. Dalam kondisi ini, mustahil dapat terwujud melainkan jika ada seseorang yang mengatur dan memimpin serta bekerja demi terwujudnya maslahat dan tercegahnya mereka dari kerusakan. Ibn Hazm menegaskan bahwa telah menjadi konsensus (kesepakatan bersama) seluruh Ahlus sunnah, Murji'ah, Syi'ah dan Khawarij akan kewajiban menegakkan imamah.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa : 59⁴⁷:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu

⁴⁶ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta, Gozian Press, 2013), h. 73.

⁴⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penerbit Diponegoro, Bandung, 2009, hlm. 87

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah Ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik (akibatnya). (Q.S An-Nisa : 59)

Abu Ja'far al-Thabari mengomentari ayat ini, “pendapat yang paling utama dan benar dalam hal ini, mereka adalah para pemimpin yang kepada Allah ketaatan dan bagi kaum muslimin kebaikan dan *maslahat*. Imam Abu Bakar bin al-Arabi berkata, “pendapat yang benar menurutku, mereka adalah para pemimpin dan ulama. Adapun para pemimpin, dikarenakan sumber urusan dan hukum berasal dari mereka, sedangkan ulama’, karena bertanya pada mereka hukumnya wajib atas makhluk. Jawaban mereka mengikat, dan menunaikan fatwa mereka wajib”.⁴⁸

Sedangkan menurut ijma’ ulama kewajiban mengangkat pemimpin adalah :

1. Imam Al-Mawardi menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.⁴⁹
2. An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwasannya wajib atas kaum muslimin memilih dan mengangkat pemimpin
3. Ibnu Khaldun lebih tegas mengatakan bahwa menegakkan imamah hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam syari’at

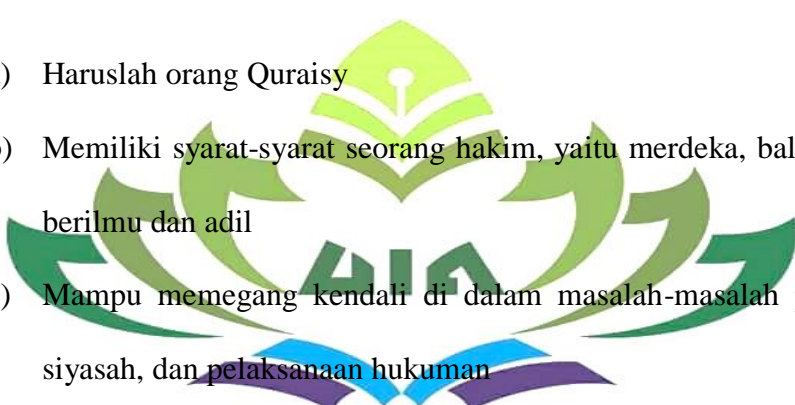
⁴⁸ Ibid. h. 78.

⁴⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press. 1990),

serta konsensus para sahabat dan tabi'in. Tatkala Rasulullah saw. wafat, para sahabat segera memberi bai'at pada Abu Bakar as-Shiddiq ra dan menyerahkan pengaturan urusan mereka padanya. Hal ini berlaku pada setiap jaman, hingga menjadi sebuah konsensus. Ini jelas menunjukkan kewajiban memilih seorang imam (kepala negara).

Dalam mekanisme pemilihan pemimpin harus memenuhi syarat-syarat menurut Islam dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi Imam atau pemimpin.

Abu Ja'la al-Hambali menyebut empat syarat untuk menjadi pemimpin :

- 
- a) Haruslah orang Quraisy
 - b) Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baligh berakal, berilmu dan adil
 - c) Mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, siyasah, dan pelaksanaan hukuman
 - d) Orang yang paling baik/utama dalam ilmu dan agama

Sedangkan menurut Al Mawardi :⁵⁰

- a) Memiliki sifat adil dengan syarat-syarat universal
- b) Mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad
- c) Sehat inderawinya dengan begitu ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya

⁵⁰ *Ibid.* h. 4.

- d) Utuh anggota tubuhnya atau sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat
- e) Wawasan yang luas untuk mampu mengatur kehidupan rakyat maupun mengelola kepentingan umum
- f) Memiliki keberanian untuk mengatasi tiap masalah intern maupun ekstern
- g) Keturunan Quraisy atau nasab yang berasal dari Quraisy

Menurut Al-Ghazali pula, yang terpenting antar kesemuanya itu adalah sifat wara', yaitu berbudi pekerti luhur, adapun masalah-masalah hukum dan syari'at Islam dia bisa mengembalikannya kepada para ulama dan para cendekiawan yang terpandai pada zamannya, dan dalam mengambil keputusan didasarkan kepada pendapat dan urusan mereka itu.

Tokoh-tokoh tersebut seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Abu Ja'la al-Hambali mensyaratkan suku Quraisy sebagai calon pemimpin, sebab suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pemimpin yang tangguh. Karena itu tidak sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan di luar golongan itu. Al-Baqillani menambahkan syarat tersebut berdasarkan hadist Rasulullah saw, "para pemimpin harus dari bangsa Quraisy".⁵¹

⁵¹ Sayuti Pulungan *Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta : Rajawali, 1997), h. 256

Imam Al-Nawawi, menyatakan bahwa para ulama sepakat akan pengangkatan seorang khilafah melalui cara istikhlaf dan pengangkatan melalui kesepakatan AHWA (Ahlu al-Halli wa al-Aqdi) :⁵²

1. Metode Ahlu al-Halli wa al-Aqdi (AHWA)

Metode ini dasar bagi sistem pemilihan dan pengangkatan pemimpin menurut ahlu sunnah wa al-jamaah. Jika seorang pemimpin wafat, atau dicopot dari jabatannya, menjadi kewajiban bagi AHWA untuk memberikan bai'at kepemimpinan.

AHWA adalah salah satu metode pemilihan calon pemimpin yang dipilih oleh orang berkompeten dalam bidangnya berkumpul bersama dalam sebuah forum. Dalam istilah Indonesia dikenal dengan tim khusus pemilihan calon kepala daerah. Dalam AHWA beberapa nama akan digodok, akan dikaji kemampuan hingga riwayat hidupnya sehingga layak untuk dijadikan pemimpin.

2. Wasiat

Apabila seorang pemimpin membuat wasiat penunjukkan seseorang untuk menduduki jabatan khalifah setelahnya, maka hal itu dibenarkan oleh syariat, selama syarat-syarat bagi seorang khalifah terpenuhi pada diri orang yang ditunjuk. Demikian pula, kebolehan baginya menyerahkan jabatan khalifah sesudahnya pada majelis syura dalam jumlah terbatas yang ditunjuk olehnya. Majelis Syuro tersebut akan berembug dan sepakat memberikan bai'at pada salah satu di antara mereka setelah

⁵² *Ibid.* h. 258.

kematiannya. Hal ini telah dilakukan oleh Umar bin al-Khattab ra, tatkala menunjuk anggota syuro sebanyak enam orang dari kalangan sahabat senior, yakni Ustman, Ali, Zubair, Abdur Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Thalhah ra. Mereka bermusyawarah hingga lahir kata sepakat menyerahkan kepemimpinan kepada Ustman bin Affan ra.

3. *Al Ghalabah* atau *Al Qahr*

Pada prinsipnya, metode ini termasuk metode yang tidak disyariatkan, bahkan dilarang (diharamkan) dalam hal pengangkatan seorang pemimpin. Makanya, tidak boleh ditempuh melainkan dalam kondisi-kondisi darurat demi maslahat kaum muslimin dan melindungi darah mereka. Semisal metode ini, apa yang dikenal pada jaman kita hari ini sebagai “kudeta militer” dan sebagainya.

Para fuqaha ahlu sunnah wa al-jamaah berpendapat, bahwa kepemimpinan dianggap sah melalui metode ini kendati tidak disyariatkan- walaupun orang yang naik sebagai pemimpin setelah melakukan kudeta tidak terpenuhi padanya syarat-syarat seorang muslim, seperti jahil atau fasik, selama ia adalah seorang muslim.

Jika pemimpin meninggal karena peristiwa kudeta, lalu naik ke puncak kepemimpinan seorang pengganti yang terpenuhi padanya syarat-syarat kepemimpinan melalui proses penunjukkan dan tidak pula bai'at, serta menguasai manusia melalui kekuatan (militernya), dianggap sah kepemimpinan baginya; dan wajib menaatinya demi mengatur persatuan kaum muslimin. Adapun jika tidak terpenuhi padanya syarat-syarat bagi

seorang pemimpin, misalnya ia seorang yang jahil atau fasik, terdapat dua pendapat; yang paling benar dari kedua pendapat tersebut adalah, kepemimpinannya tetap dianggap sah sekalipun ia masih melakukan perbuatan maksiat, menurut an-Nawawi. Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa kapan pun seorang itu sanggup mengatur (memimpin) mereka (rakyat), apakah melalui ketaatan rakyat atau karena kekuatan (militer) nya, maka ia adalah pemilik kekuasaan yang harus ditaati jika memerintahkan untuk taat pada Allah.⁵³

4. Ajakan Untuk Memilih Dirinya

Jika seorang khalifah wafat dan tidak menunjuk seseorang tertentu yang akan menggantikannya demikian pula AHWA belum memilih khalifah bagi kaum muslimin maka menurut Ibnu Hazm boleh bagi seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat pemimpin maju mencalonkan dirinya. Ibnu Hazm melanjutkan menyatakan bahwa menemukan pengangkatan pemimpin itu sah melalui beberapa metode, jika seorang imam wafat dan tidak menunjukkan salah seorang untuk menggantikannya sebagai khalifah setelahnya, boleh bagi seorang yang layak menduduki kursi kepemimpinan untuk maju dan mengajak (orang-orang) memilih dirinya dan hal ini tidak ada perselisihan padanya wajib mengikutinya, sah bai'atnya, tetap kepemimpinan dan ketaatan padanya sebagaimana dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ra. ketika khalifah

⁵³ Rapung Samuddin, *Op.Cit.* 23.

Ustman bin Affan terbunuh.⁵⁴

Berikut Model-model pemilihan kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin.⁵⁵

a. Model pemilihan Abu Bakar (632-634 M)

Semasa hidup-Nya, Rasulullah tidak pernah menitipkan pesan dan menunjuk siapa kelak yang akan menjadi pengganti dan penerus atas kepemimpinan-Nya, sehingga sepeninggal beliau terjadilah beberapa perselisihan ketika proses pengangkatan khalifah khususnya antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar, dan pada akhirnya setelah dilakukan musyawarah ditemukan sebuah kesepakatan bersama. Sepeninggal Rasulullah Abu Bakar menjadi khalifah penggantinya dengan cara Demokrasi/Musyawah/Konsensus antara kaum Anshar dan Muhajirin. Adapun dasar kesepakatan tersebut adalah:

- 1) Abu Bakar adalah orang pertama orang yang mengakui peristiwa Isra" Mikraj.
- 2) Beliau juga orang yang ikut bersama Rasulullah SAW ketika hijrah ke Yastrib.
- 3) Ia juga orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam dan ketika Rasulullah SAW sakit, Abu Bakar menggantikannya sebagai imam.

Adapun proses pemilihan nya adalah, pada awalnya kaum Anshar

⁵⁴ *Ibid.* h. 23.

⁵⁵ Dr. Badri Yatim, M.A, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,), h. 36.

menawarkan Saad bin Ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka, dan Abu Bakar menawarkan Umar bin Khatab dan Abu Ubaidah serta berkata kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah SWT karena pada permulaan Islam mereka telah mengakui Muhammad sebagai nabi dan tetap bersamanya dalam situasi apapun, sehingga pantaslah khalifah muncul dari kaum Muhajirin.⁵⁶

Kemudian Umar menolak usulan dari Abu Bakar dan berkata Abu Bakarlah yang pantas menjadi khalifah dari kaum Muhajirin, dan setelah sekian lama perdebatan akhirnya keputusan jatuh kepada Abu Bakar dan Umar mengucapkan sumpah setianya lalu diikuti oleh Saad bin Ubadah dan diikuti oleh seluruh umat Islam.

b. Model pemilihan Umar bin Khatab (634-644 M) Adapun pemilihan Umar bin Khatab sebagai berikut:

1) Penunjukan Abu Bakar dengan persetujuan rakyat

Abu Bakar sebagai khalifah pertama menunjuk Umar sebagai khalifah penggantinya, penunjukan tersebut berdasarkan dengan bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Ustman bin Affan, Asid bin Hudhair Al-Anshary, Said bin Zaid serta sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Anshar. Pada umumnya mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslim dengan serempak.

⁵⁶ Dr. Siti Mahmudah. S.Ag., M.Ag, *Sejarah Peradaban Islam*, (Fakultas Syariah IAIN raden Intan Lampung), h. 61.

2) Proses pemilihan

Ketika Abu Bakar dalam keadaan sakit ia menyeru kepada Ustman bin Affah untuk menulis wasiat yang mana menunjuk Umar bin Khatab sebagai penggantinya dengan maksud agar ketika sepeninggal beliau tidak ada kemungkinan perselisihan dikalangan umat Islam untuk masalah khalifah.

Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima oleh masyarakat yang segera secara beramai-rama membaiat Umar sebagai khalifah, sehingga keputusan tersebut bukan keputusan Abu Bakar sendiri namun persetujuan umat muslim semua.

c. Model pemilihan Ustman bin Affan (644-656 M)

1) Berdasarkan kesepakatan dewan majelis dan pengumuman suara terhadap dua calon khalifah.⁵⁷

Berbeda dengan Umar bin Khatab, pemilihan Ustman berdasarkan kepada konsensus dewan pemilihan khalifah dan juga terdapat dua kandidat kuat yaitu Ustman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib yang mana pada akhirnya terpilih lah Ustman sebagai khalifah.⁵⁸

2) Proses pemilihan

Sebelum Umar wafat karena ditikam oleh seorang budak Persia ia telah membentuk sebuah dewan formatur yang bertugas untuk memilih khalifah baru, dewan tersebut terdiri dari Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin

⁵⁷ Ibnu al-Jauzi, *Manaqih Umar ibn al-Khattab, Tahqiq: Zainab Ibrahim al-Qaruth* (Edisi Terjemahan cet I), h. 67.

⁵⁸ *Ibid.* h. 64.

Auf, dan Saad bin Abi Waqqas. Setelah Umar bin Khatab wafat dewan yang telah dibentuk tersebut mengadakan rapat, dan dari keenam dewan tersebut empat diantaranya mengundurkan diri dan tinggalah dua calon kuat yakni, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Namun demikian karena kedua orang yang sangat mulia ini tidak gila terhadap kekuasaan dan jabatan mereka saling menuding dan beranggapan bahwa mereka tidak lebih baik dari lawannya, sehingga Ali menunjuk Ustman sebagai khalifah dan begitu juga sebaliknya.

Karena kejadian tersebut Abdurrahman bin Auf meminta kepada dewan formatur agar rapat ditunda, dengan tujuan menanyakan persetujuan masyarakat ketika itu. Dan pada akhirnya Ustman yang menjadi khalifah pengganti Umar bin Khatab.

d. Model pemilihan Ali bin Abi Thalib (656-661 M)

Secara umum dasar pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sama dengan pemilihan Ustman bin Affan, hanya saja calon pada masa ini hanya Ali yang menjadi calon tunggal dari dewan pemilihan khalifah.

Adapun proses awal terjadinya pemilihan Ali bin Abi Thalib adalah sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Pada awalnya Ali menolak untuk diangkat menjadi khalifah, karena melihat dari berbagai sisi dan berbagai pertimbangan pada akhirnya beliau menyutujuinya.

⁵⁹ Mustafha Hilmi, *Nizam al-Khalifah Fi al-Fikri al-Islam*, (edisi terjemahan), cet II, h. 106.

2) Namun demikian, terpilihnya Ali sebagai khalifah menyisakan beberapa kelompok pemberontak, yang menuntut agar pembunuhan Ustman bin Affan diusut dan pembunuhnya dihukum.

Empat metode pengisian jabatan kepala negara yang masing-masing diterapkan dalam pengangkatan Khulafa al-Rasyidin, menurut Jimly Assiddiqie, diidealkan sebagai pilihan metode suksesi damai. Meskipun mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sejauh menyangkut keabsahan secara sosiologis, keempatnya mendapatkan dukungan luas di antara para sahabat dan kekuasaan yang berhasil dibangun terbukti efektif dalam sejarah.⁶⁰

B. Pelaksanaan Diskualifikasi Calon Kepala Daerah dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pemilihan Kepala Daerah

1. Pemilihan Kepala Daerah

Indonesia dengan sistem demokrasinya dalam memilih pemimpin menggunakan sistem pemilihan umum yang demokratis. Pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. “kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan walikota dan wakil walikota untuk kota.”⁶¹

⁶⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008), h. 146.

⁶¹ Pasal 1 ayat (1) PP No. 6/2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menurut Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul Reformasi Pemilu. 53 Secara universal pemilihan umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat” .⁶²

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan konsekuensi fundamental dalam penyelenggaraan demokrasi juga rekrutmen politik yakni penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati maupun walikota/wakil walikota yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD.⁶³

2. Pengertian Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Menurut UU. No. 8 Tahun 2015

Pemilihan Kepala Daerah merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Demokrasi sendiri adalah dari, oleh, dan untuk rakyat serta diharapkan dalam penyelenggaraan dilakukan jujur, adil, dan aman. Perubahan sistem pemilihan yang secara langsung dilaksanakan misalnya saja dalam pemilihan Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang membawa arah dalam suatu kabupaten/kota yang dipimpinnya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Minimal secara

⁶² 53Ibnu Tricahyo, “Reformasi Pemilu, Menuju Pemisahan Pemilu Nasional & Lokal. PT.In-Trans Publishing”

⁶³ [https://id.m.wikipedia.org/pemilihan kepala daerah diIndonesia](https://id.m.wikipedia.org/pemilihan_kepala_daerah_diIndonesia). Diakses pada tanggal 6 Desember 2018, Pukul 23.25 WIB

moral ada ikatan dan pertanggungjawaban kepada konstituen atau pemilihnya yang notabene adalah masyarakat yang dipimpinnya.

Selain sebagai pembelajaran dan pendidikan politik langsung kepada masyarakatnya. Pilkada juga merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Bahwa tolak ukur demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman.

Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Pengertian Diskualifikasi Calon Kepala Daerah dalam pasal 54 ayat (1) yaitu dalam hal calon berhalangan tetap sejak penetapan sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 3 hari terhitung sejak calon berhalangan tetap.⁶⁴

Dan berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015⁶⁵ dan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan wakil Walikota sebagaimana telah diubah

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

⁶⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan wakil Walikota.

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, menyatakan bahwa dalam hal pada saat dimulainya masa kampanye sampai hari pemungutan suara terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur. Tujuan Diskualifikasi adalah untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum.

3. Dasar Hukum Diskualifikasi Calon Kepala Daerah

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.

Ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dirasakan masih terdapat

beberapa inkosistensi dan menyisakan sejumlah kendala apabila dilaksanakan, sehingga perlu disempurnakan.

Dasar hukum diskualifikasi calon kepala daerah terdapat dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 dalam pasal 54 ayat (1) yaitu : yaitu dalam hal calon berhalangan tetap sejak penetapan sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 3 hari terhitung sejak calon berhalangan tetap. Dan hal ini apabila setelah lewat dari hari yang telah ditentukan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak mengajukan pengganti maka di anggap gugur. Dan dalam hal calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.⁶⁶

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 dalam pasal 83 ayat (1) dan (2) :

- 1). Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan Pemilihan.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Pasal 54 ayat (1) dan (2) h. 48

- 2). Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti.⁶⁷

4. Mekanisme Diskualifikasi Calon Kepala Daerah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu dan pemilukada. Dalam penyelenggaraan pemilu, komisi pemilihan umum (KPU) bertugas melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu).

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 juncto Nomor 8 Tahun 2015, yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selanjutnya perubahan diatur yang di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang

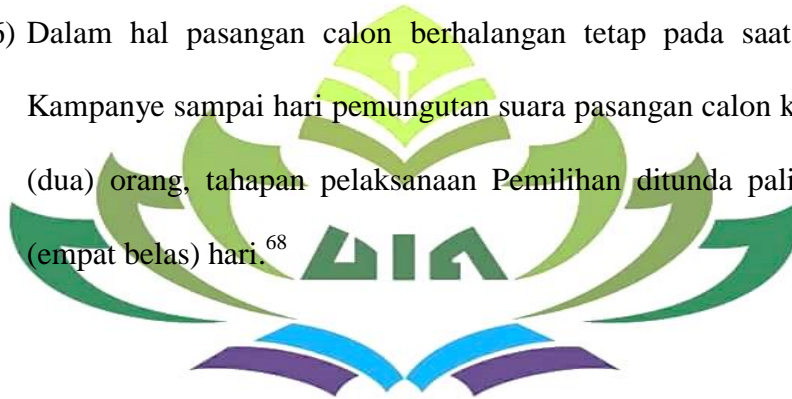
⁶⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan wakil Walikota.

pemilihan umum (pemilu). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, salah satu tugas pokok dari lembaga ini adalah memberikan laporan pertanggung jawaban dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya kepada Presiden bukan kepada rakyat yang seharusnya pemilu merupakan hajatan rakyat maka pertanggung jawaban pelaksanaan pemilu seharusnya pada rakyat.

Mekanisme Diskualifikasi Calon Kepala Daerah menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2015 yaitu terdapat dalam pasal 54 yaitu :

- 1) Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pasangan calon berhalangan tetap.
- 2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengusulan.
- 3) Dalam hal pasangan calon pengganti berdasarkan hasil penelitian administrasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) hari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, menetapkannya sebagai pasangan calon.

- 4) Dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
- 5) Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- 6) Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari.⁶⁸



⁶⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, h. 48

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Pembentukan KPU Lampung Timur

Sejarah lembaga penyelenggara di Indonesia dimulai pada 7 November 1953 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Panitia inilah yang bertugas untuk menyiapkan, memimpin, dan menyelenggarakan Pemilu 1955 guna memilih anggota Dewan Konstituante dan anggota DPR.

Presiden Soekarno melantik pimpinan dan anggota PPI pada 28 November 1953. Sejak itu maka lembaga yang bersifat ad hoc ini mulai menjalankan tugasnya. Pemilu 1955 yang dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante kemudian dikenal luas sebagai pemilu pertama yang berlangsung damai, adil, dan demokratis.

Penyiapan perangkat legal formal Pemilu 1955 membutuhkan waktu bertahun-tahun yang berselang masa beberapa kabinet. Gagasan untuk menggelar pemilu diumumkan kali pertama pada 5 Oktober 1945 oleh para pendiri bangsa, namun tidak bias segera direalisasikan akibat suasana revolusi kemerdekaan yang dimulai dengan Agresi Militer Belanda I dan II. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949, dan Indonesia menjadi

negeri federal Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasar kan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, setiap kabinet pemerintah di era Demokrasi Liberal (sistem parlementer) berganti tidak satu pun kabinet yang berhasil membentuk undang-undang pemilu.

Akhirnya, baru pada kabinet Wilopo, yang disokong koalisi PNI-Masyumi-Sosialis, berhasil diajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR pada 4 April 1953. Pasal 17 UU Nomor 7 Tahun 1953 menyebutkan, “Penyelenggara pemilu terdiri atas Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang berkedudukan di ibukota negara, Panitia Pemilihan yang berkedudukan di setiap daerah pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten yang berkedudukan di setiap kecamatan, Panitia Pemungutan Suara yang berkedudukan di setiap desa, dan panitia Pemilihan Luar Negeri”

Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan (PP) ditunjuk oleh Menteri Kehakiman ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ketentuan terakhir ini sempat menimbulkan ketegangan antara pemerintah dengan PPI dalam menyusun kepanitian pemilu secara keseluruhan, karena Pasal 18 UU Nomor 7 Tahun 1953 dengan jelas menyatakan bahwa PPI bertugas menyiapkan, memimpin, dan menyelenggarakan pemilu, yang berarti juga membuat peraturan teknis pemilu. Namun Rapat Dewan Menteri pada Mei 1954

memutuskan bahwa PP merupakan satu organisasi di bawah pimpinan PPI. Adapun pegawai pamong praja atau PNS Pemerintah Daerah (Pemda) yang karena jabatannya menjadi ketua badan penyelenggara pemilihan, tugasnya hanya bersifat teknis semata. Demikian juga peran Menteri Kehakiman dan Mendagri dalam pengangkatan kepanitian pemilu sifatnya hanya administratif, karena calon-calon sesungguhnya dipilih dan diajukan oleh PPI.

Dalam memilih calon-calon anggota PP dan PPKa, PPI berusaha mengakomodasi usulan-usulan partai peserta pemilu. hal ini membuat peran PPI sangat sentral, dan karenanya posisi keanggotaan PPI benar-benar dijabatkan partai-partai yang berkoalisi dalam kabinet. Kabinet Walipo yang berhasil mengesahkan UU pemilu ternyata gagal membentuk PPI karena tidak tercapai kata sepakat di antara partai-partai koalisi PNI-NU, dan beberapa partai kecil. Koalisi tersebut berhasil membentuk pada awal November 1953. Dalam Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang Pengangkatan PPI tertanggal 7 November 1953, ditetapkan sembilan anggota PPI. Kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1955, tertanggal 26 Desember 1955, dilakukan penambahan lima anggota PPI dengan masa kerja empat tahun seperti diatur di dalam UU Nomor 7 Tahun 1953.

Pada perkembangan selanjutnya, setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menandai pemberlakuan kembali UUD 1945, Indonesia mulai menandai masa Demokrasi

Terpimpin. Dengan demikian, sistem Demokrasi Liberal ditinggalkan dan lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUDS 1950, termasuk PPI dengan sendirinya bubar atau dibubarkan.

Pergantian dan penambahan anggota PPI sesungguhnya tidak lepas dari dinamika politik yang berkembang dalam sistem pemerintahan parlementer. Seperti disebutkan sebelumnya, Kabinet Wilopo gagal menyusun PPI. Kegagalan ini merupakan salah satu faktor penting jatuhnya Kabinet Wilopo. Selanjutnya kegagalan tersebut dimanfaatkan oleh Kabinet Alisastroamidjojo yang menunjuk semua anggota PPI berasal dari partai koalisi, dan mengabaikan usulan-usulan dari kubu oposisi. Kenyataan inilah yang mengundang kritik keras kubu oposisi yang khawatir sekali akan independensi dan netralitas PPI dalam penyelenggaraan pemilu.

Setelah pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, pada akhir 1969, Presiden Soeharto menjadwalkan Pemilu 1971. Bagaimana posisi, fungsi, struktur dan organisasi penyelenggaraan pemilu Orde Baru? Pemerintah saat itu menolak kehendak partai untuk terlihat dalam kepanitian pemilu. Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 1969 menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan pemerintah di bawah pimpinan presiden. Untuk melaksanakan pemilu, presiden membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diketahui oleh Mendagri. Adapun tugas LPU meliputi: Pertama, merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan pemilu. Kedua, memimpin dan mengawasi PPI, Panitia Pemilihan Daerah I (PPD I),

Panitia Pemilihan Daerah II (PPD II), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pendaftaran Pemilih (PPPh). Ketiga, mengumpulkan dan menyistamkan bahan-bahan dan data-data pemilu. Keempat, mengerjakan hal-hal yang dipandang perlu untuk melaksanakan pemilu.

PPI yang berkedudukan di Jakarta bertugas menyelenggarakan pemilu DPR, serta merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan pemilu untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II. PPD I yang berkedudukan di ibukota provinsi bertugas membantu tugas-tugas PPI, yaitu menyelenggarakan pemilu untuk DPRD I, serta mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan pemilu untuk pemilihan anggota DPRD I dan anggota DPRD II. PPD II yang berkedudukan di ibukota kecamatan bertugas menyelenggarakan pemungutan suara, serta membantu tugas-tugas PPD II. PPPh yang berkedudukan di setiap desa bertugas menyelenggarakan pendaftaran pemilih, serta membantu tugas-tugas PPS.

Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 1969 juga menentukan Mendagri, gubernur, bupati/walikota, camat dan lurah/kepala desa, masing-masing menjadi ketua dan merangkap anggota PPI, PPD I, PPD II, PPS dan PPPh. Selanjutnya ditentukan, bahwa anggota PPI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Mendagri, anggota-anggota PPD I dan PPD II diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri atas usul gubernur, dan anggota-anggota PPS dan PPPh diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota atas usul camat.

Setelah pemerintah Orde Baru tumbang dan digantikan pemerintah di era reformasi mulai tahun 1998, model penyelenggara pemilu di Indonesia kembali mengalami perubahan format. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor XIV/1998, memerintahkan Presiden B.J. Habibie untuk menyelenggarakan pemilu selambat-lambatnya pada 7 Juni 1999. Berkenaan dengan pembentukan lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah waktu itu benar-benar tidak mau mencampuri, bahkan demi menjaga netralisirnya pemerintah menunjuk kalangan akademisi dan profesional untuk mewakili pemerintah dalam keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu.⁶⁹

Pemilu tahun 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu pengganti Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang dibentuk oleh Presiden. KPU telah menyelenggarakan pemilu tahun 1971 sampai pemilu 1997. Dasar pembentukan KPU pertama ini adalah ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 Poin 5 Tap MPR RI No.XIV/MPR 1998 disebutkan bahwa:

⁶⁹ Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), h. 28-32.

Pemilihan umum diselenggarakan oleh badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur-unsur partai-partai politik peserta pemilu dan pemerintah, yang bertanggung jawab kepada presiden.⁷⁰

Pada saat penyelenggaraan pemilu tahun 1999 aturan main diatur dalam 50 No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa penanggung jawab pemilu adalah Presiden. Meskipun UU No. 3 Tahun 1999 telah menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bebas dan mandiri, tetapi karena keanggotaan KPU berasal dari unsur politik peserta pemilu dan pemerintah, kemandirian dari lembaga KPU sangat sulit terjadi karena terjadi conflict of interest di dalamnya, unsur keanggotaan KPU bukanlah unsur yang bebas dan mandiri, tetapi peserta pemilu itu sendiri. Untuk itu, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dikatakan merevisi kedudukan dan kemandirian KPU sebagai penyelenggara pemilu.⁷¹

Pada prinsipnya sifat KPU tetap sebagaimana diatur dalam UU. No. 12 Tahun 2003, yaitu bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hanya saja dalam undang-undang baru ini, yaitu UU No. 22 Tahun 2007 yang telah di

⁷⁰ Muhammad Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015) cet ke-1, h.139-140.

⁷¹ Ni"Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), Ed. Revisi, Cet.9. h.245.

revisi UU No. 15 Tahun 2011 dinyatakan dengan kalimat yang berbeda, yaitu: “Wilayah kerja KPU meliputi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota juga sama seperti sebelumnya yaitu bersifat tetap dan mandiri.”⁷²

2. Susunan Organisasi KPU Kabupaten Lampung Timur

KPU Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 2 unsur yaitu komisioner dan sekretariat. Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dimana komisioner melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu dan unsur sekretariat membantu komisioner dalam melakukan tugasnya terkait dengan administrasi umum dan keuangan, personalia dan rumah tangga. Rincian kedua unsur ini dijelaskan sebagai berikut :

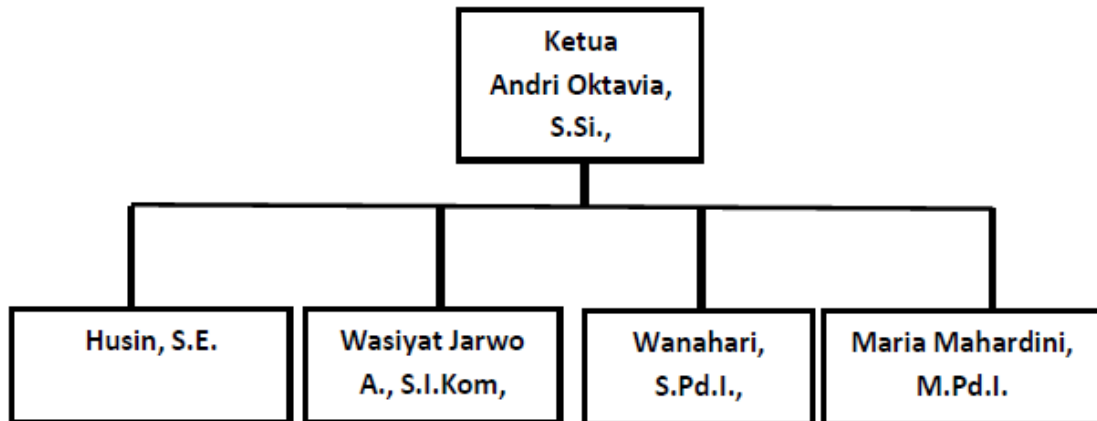
a. Unsur Komisioner

Komisioner KPU yang terdiri dari 5 orang yang dikoordinasi oleh satu orang ketua dan empat orang anggota. Untuk komisioner KPU Lampung Timur periode 2014 – 2019 disahkan melalui pengambilan sumpah anggota Tanggal 17 November 2014. Komisioner periode 2014 – 2019 terdiri dari Andri Oktavia, S.Si., Husin, S.E. Wasayat Jarwo A.,

⁷² Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas (pemilu legaslatif)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.19.

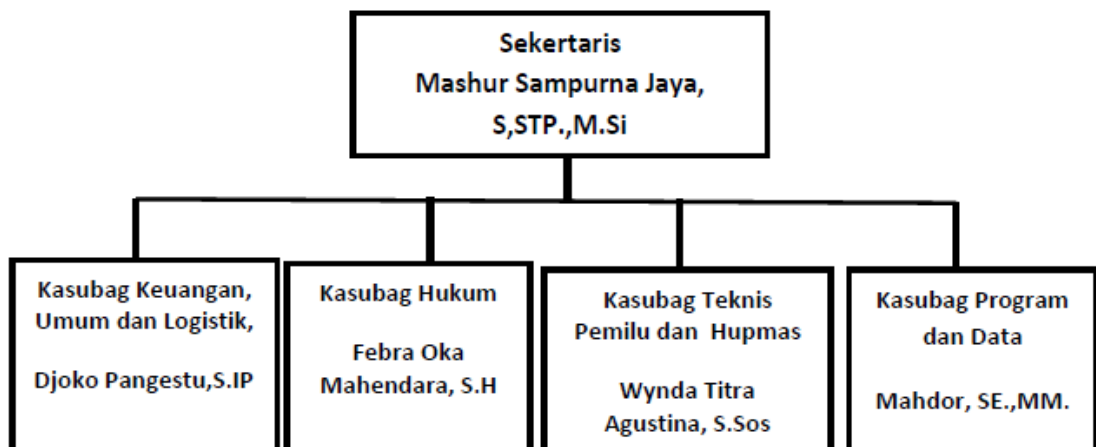
S.I.Kom, Wanahari, S.Pd.I., Maria Mahardini, M.Pd.I. Struktur komisaris

Lampung Timur ini dapat dilihat melalui gambar berikut :



b. Unsur Kesekretariatan

Unsur kesekretariatan dipimpin oleh sekretaris KPU Lampung Timur yaitu Andri Oktavia, S.Si., Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota maka struktur KPU Lampung Timur ini dapat dilihat melalui gambar berikut:



c. Pembagian Tugas

Pembagian tugas yang terdiri dari 5 komisioner yang merupakan koordinator pengarah dari divisi-divisi yang ada.

- a. Divisi sosialisasi
- b. Divisi hubungan antar lembaga
- c. Divisi teknis
- d. Divisi kampanye
- e. Divisi anggaran dan logistic

3. Visi dan Misi KPU Kabupaten Lampung Timur

a. Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

b. Misi

- 1) Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- 2) Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan



- 5) Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- 6) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
- 7) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.⁷³

4. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Lampung Timur

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Pilkada) . Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 13 UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Pilkada), yaitu:⁷⁴

1. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:
 - a. Merencanakan program dan anggaran ;

⁷³ <http://kpu-lampungtimurkab.go.id/> diakses Tanggal 30 November 2018 Pukul 13.00

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, 176-179

- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;



h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:

1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Pemilihan,

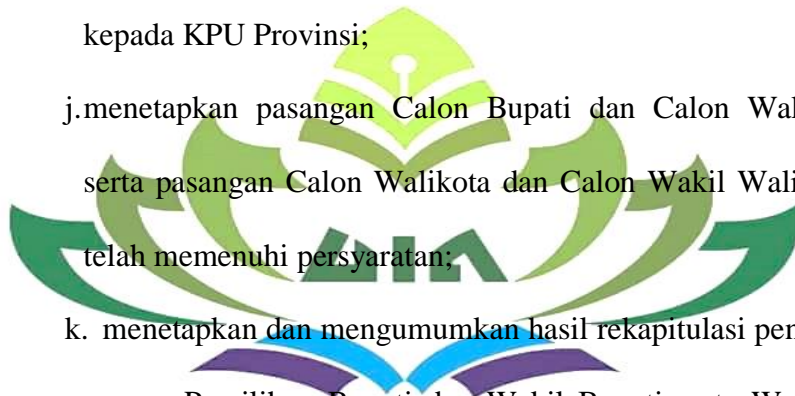
serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;

i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;



- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindak lanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 8 UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tugas dan Wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:⁷⁵

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- b. Mengordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
- c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bagian Ketiga Paragraf 1 Pasal 8

- d. Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan.

B. Diskualifikasi Calon Kepala Daerah di KPU Lampung Timur

1. Alasan-Alasan Diskualifikasi Calon Kepala Daerah di KPU Lampung Timur

Dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Andri Oktavia memberikan alasan-alasan Menggurkan Calon Kepala Daerah Lampung Timur alasan-alasan yang diberikan berdasarkan apa yang telah di atur dalam Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Menurut Andri alasan pendiskualifikasian pasangan calon bupati Erwin Arifin berdasarkan sesuai peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pilkada, Pada tahun pemilihan 2014-2015.⁷⁶

Dalam PKPU tersebut, menyebut, apabila ada pasangan calon yang berhalangan tetap, dan masih terdapat dua pasangan calon atau lebih, maka pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat atau dihapus dalam pelaksanaan Pilkada, Status Erwin Arifin sebagai calon bupati Lampung

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ketua KPU Lampung Timur Andri Oktavia, S.Si., pada Tanggal 12 November 2018 Pukul 09.28 WIB.

Timur gugur,” kata Andri Oktavia, Ketua KPU Lampung Timur, Menurut Andri, keputusan itu merupakan hasil rapat pleno KPU Lampung Timur (10/11/2015), setelah pihaknya melakukan kajian atas aturan dan undang-undang berkaitan pencalonan Erwin Arifin (mantan Bupati Lampung Timur) setelah calon wakilnya, Prio Budi Utomo, meninggal dunia pada Rabu (4/11/2015) atau berhalangan tetap.

Andri⁷⁷ menjelaskan, dasar keputusan itu adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 83 Ayat 1 dan 2 yaitu :⁷⁸

- 1). Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan Pemilihan.
- 2). Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti.

Dan Menurut Febra Oka Mahendras⁷⁹ sebagai Kasubag Hukum KPU Lampung Timur, keputusan KPU Lampung Timur dalam menggurkan pasangan calon bupati Erwin Arifin dan Prio Budi Utomo dengan alasan calonnya meninggal dunia dan hal ini juga jelas di atur dalam Undang-

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ketua KPU Lampung Timur Andri Oktavia, S.Si., pada Tanggal 12 November 2018 Pukul 09.28 WIB.

⁷⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan wakil Walikota.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Kasubag Hukum KPU Lampung Timur, Febra Oka Mahendra, S.H., pada Tanggal 12 November 2018 Pukul 10.00 WIB.

Undang No 8 Tahun 2015 Pengertian Diskualifikasi Calon Kepala Daerah dalam pasal 54 ayat (1) yaitu dalam hal calon berhalangan tetap sejak penetapan sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 3 hari terhitung sejak calon berhalangan tetap.

Namun sejak kampanye 27 agustus 2015 sampai 5 desember 2015 calon bupati Erwin tidak mengajukan pengganti dan terdapat ada dua pasangan calon atau lebih, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota tetap melanjutkan tahapan pemilihan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2015 pasal 54 ayat (5) : Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

2. Tujuan Diskualifikasi Calon Kepala Daerah di KPU Lampung Timur

KPU dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya harus berdasarkan ketentuan aturan hukum yang berlaku seperti dalam Menurut Andri Oktavia selaku ketu KPU,⁸⁰ permasalahan diskualifikasi calon kepala daerah di lampung timur digugurkan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur Sebab, Calon Bupatinya Priyo Budi Utomo meninggal dunia saat

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ketua KPU Lampung Timur Andri Oktavia, S.Si., pada Tanggal 12 November 2018 Pukul 09.28 WIB.

masa kampanye. “Kenyataannya, Erwin Arifin harus dinyatakan gugur melalui SK KPUD atau SK KPU kabupaten Lampung Timur Nomor: 56/Kpts/KPU.Kab-008.435605/2015 tanggal 10 November 2015. Dan didasari dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 54 ayat (1) dan (5) dan diperkuat dari ketentuan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 9 tahun 2015 pasal 83 ayat 1 dan 2 ,

Dalam hali ini tujuan digugurkannya pasangan calon bupati Erwin Arifin karena tidak memenuhi persyaratan dan bertujuan untuk menjalankan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam undang-undang sebagaimana sebagai dasar hukum menetapkan diskualifikasi calon kepala daerah yang telah di atur jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 54 ayat (1) dan (5) dan diperkuat dari ketentuan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 9 tahun 2015 pasal 83 ayat 1 dan 2 .

3. Mekanisme Diskualifikasi Calon Kepala Daerah di KPU Lampung Timur

Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Pengertian Diskulaifikasi Calon Kepala Daerah dalam pasal 54 ayat (1) yaitu dalam hal calon berhalangan tetap sejak penetapan sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 3 hari terhitung sejak calon berhalangan tetap.

Menurut Mashur Sampurn Jaya⁸¹ selaku sekretaris KPU Lampung Timur Mekanisme Diskualifikasi calon bupati Erwin Arifin di KPU Lampung Timur Tahun 2015 yaitu berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lampung Timur Nomor: 56/Kpts/KPU.Kab-008.435605/2015 Tentang Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015. Berdasarkan Surat Kematain dari Kepala Desa Labuhan Ratu I, Nomor 470/371/07.2012/XI/2015 tanggal 05 November Sdr. H.Priyo Budi Utomo, S.Hut. yang merupakan Calon Wakil Bupati Lampung Timur yang berpasangan dengan H. Erwin Arifin, SH., MH. Dinyatakan meninggal dunia (berhalangan tetap) pada tanggal 04 November 2015 pada masa kampanye.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015⁸² dan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Sekretaris KPU Lampung Timur Mashur Sampurna Jaya, S.STP., M.Si., pada Tanggal 12 November 2018 Pukul 13.28 WIB.

⁸² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, 176-179

2015,⁸³ menyatakan bahwa dalam hal pada saat dimulainya masa kampanye sampai hari pemungutan suara terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

Tujuan Diskualifikasi adalah untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum, perlu menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

Adanya ketentuan tersebut telah membuat Erwin Arifin selaku calon bupati Lampung Timur digugurkan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur. Sebab, Calon Bupatinya Priyo Budi Utomo meninggal dunia pada tanggal 04 November 2015 saat masa kampanye tanggal 27 Agustus 2015 sampai 5 Desember 2015. Dengan ditetapkannya keputusan Pasangan calon H. Priyo Budi Utomo, S.Hut. sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 42/Kpts/KPU.Kab-008.435605/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Menenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015. Kabupaten Lampung Timur Nomor 43/Kpts/KPU.Kab-

⁸³Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan wakil Walikota.

008.435605/2015 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur dinyatakan dihapus dan gugur sebagai pasanga calon.

Konsekuensi atas keputusan digugurkan pencalonan Erwin Arifin dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur ini, pilkada Lampung Timur hanya diikuti dua pasangan calon bupati-wakil bupati, yakni nomor urut 1 pasangan Yusran Amirullah S.E dan Drs. Sudarsono M.Si yang diusung oleh Partai NasDem, Partai Gerindra, dan Partai Golkar lalu nomor urut 2 pasangan Chusnunia MSI.MKn dan Zaiful Bukhari ST.MM. yang di usung partai kebangkitan bangsa (PKB) dan partai Demokrat.



BAB IV

ANALISIS

A. Pelaksanaan Diskualifikasi Calon Kepala Daerah di KPU Kabupaten Lampung Timur

Diskualifikasi calon bupati di Lampung Timur. Andri Oktavia sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa langkah yang diambil oleh KPU Lampung Timur dengan menggugurkan pasangan calon bupati Erwin Arifin dan Bupatinya Priyo Budi Utomo, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pilkada, tahun pemilihan 2014-2015 yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 54 Ayat (1) dan (5).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota dalam Pasal 83 ayat (1) menyatakan apabila sejak kampanye 27 agustus 2015 sampai 5 desember 2015 terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, tetapi masih ada dua pasangan calon atau lebih, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota tetap melanjutkan tahapan pemilihan. Lalu, Ayat (2) Pasal itu menyatakan, calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan calon atau pasangan calon pengganti.

Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Pengertian diskualifikasi calon Kepala Daerah dalam Pasal 54 ayat (1) yaitu dalam hal calon berhalangan tetap sejak penetapan sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 3 hari terhitung sejak calon berhalangan tetap. Pasal 54 ayat (5) Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

Diskualifikasi pasangan calon bupati Berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Desa Labuhan Ratu I, Nomor 470/371/07.2012/XI/2015 tanggal 05 November Sdr. H.Priyo Budi Utomo, S.Hut. yang merupakan Calon Wakil Bupati Lampung Timur yang berpasangan dengan H. Erwin Arifin, SH., MH. dinyatakan meninggal dunia (berhalangan tetap) pada tanggal 04 November 2015 pada masa kampanye saat masa kampanye 27 Agustus sampai 5 Desember 2015, Menurut Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Apabila terdapat 2 (dua) pasangan atau lebih Calon Bupati Lampung Timur, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota tetap melanjutkan tahapan pemilihan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur. Hal sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lampung Timur Nomor: 56/Kpts/KPU.Kab-008.435605/2015 Tentang Pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015.

Dalam hal ini bahwa keputusan yang diambil oleh KPU Lampung Timur dalam mengugurkan salah satu pasangan calon Bupati Lampung Timur yaitu Erwin Arifin dan Prio Budi Utomo karena pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam hal ini penulis berpendapat bahwa apa yang menjadi keputusan KPU Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang ada di Indonesia di antaranya, Undang-Undang 8 Tahun 2015 Pasal 54 ayat (1) dan (5) dan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 83 ayat (1) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

B. Analisis Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Diskualifikasi Calon Kepala Daerah di KPU Kabupaten Lampung Timur

Menegakkan Imamah merupakan salah satu kewajiban paling agung dalam agama, sebab manusia butuh persatuan dan saling membantu satu sama lainnya. Dalam kondisi ini, mustahil dapat terwujud melainkan jika ada seseorang yang mengatur dan memimpin serta bekerja demi terwujudnya maslahat dan tercegahnya mereka dari kerusakan. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam syariat serta konsensus parasahabat dan tabi'in. Tatkala Rasulullah saw. wafat, para sahabat segera memberi bai'at pada Abu Bakar as-Shiddiq ra dan menyerahkan pengaturan urusan mereka padanya. Hal ini berlaku pada setiap jaman, hingga menjadi

sebuah konsensus. Ini jelas menunjukkan kewajiban memilih seorang imam (kepala negara).

Dalam Fiqh Siyasah pengangkatan seorang khilafah melalui cara *istikhlaf* dan pengangkatan melalui kesepakatan AHWA (*Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*), Metode ini dasar bagi sistem pemilihan dan pengangkatan pemimpin menurut ahlu sunnah wa al-jamaah. Jika seorang pemimpin wafat, atau dicopot dari jabatannya, menjadi kewajiban bagi AHWA untuk memberikan bai'at kepemimpinan. AHWA adalah salah satu metode pemilihan calon pemimpin yang dipilih oleh orang berkompeten dalam bidangnya berkumpul bersama dalam sebuah forum. Dalam istilah Indonesia dikenal dengan tim khusus pemilihan calon kepala daerah. Dalam AHWA beberapa nama akan digodok, akan dikaji kemampuan hingga riwayat hidupnya sehingga layak untuk dijadikan pemimpin. Apabila seorang pemimpin membuat wasiat penunjukkan seseorang untuk menduduki jabatan khalifah setelahnya, maka hal itu dibenarkan oleh syariat, selama syarat-syarat bagi seorang khalifah terpenuhi pada diri orang yang ditunjuk. Demikian pula, kebolehan baginya menyerahkan jabatan khalifah sesudahnya pada majelis syura dalam jumlah terbatas yang ditunjuk olehnya. Majelis *Syuro* tersebut akan berembug dan sepakat memberikan *bai'at* (pengangkatan) pada salah satu di antara mereka setelah kematiannya.

Jika seorang *khalifah* wafat dan tidak menunjuk seseorang tertentu yang akan menggantikannya demikian pula AHWA belum memilih

khalifah bagi kaum muslimin, menyatakan bahwa menemukan pengangkatan pemimpin itu sah melalui beberapa metode, jika seorang imam wafat dan tidak menunjukkan salah seorang untuk menggantikannya sebagai khalifah setelahnya, boleh bagi seorang yang layak menduduki kursi kepemimpinan untuk maju dan mengajak (orang-orang) memilih dirinya dan hal ini tidak ada perselisihan padanya wajib mengikutinya, sah *bai'atnya*.

Sama hal apa yang terjadi dalam Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2015 bahwa salah satu calon di gugurkan oleh KPU Lampung Timur karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan karena berhalangan tetap (meninggal dunia), dan dalam hal ini antara Fiqh Siyash dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 pasal 54 ayat (1) dan (5) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 pasal 83 ayat (1) dan (2), sesuai yaitu umat Islam untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri.

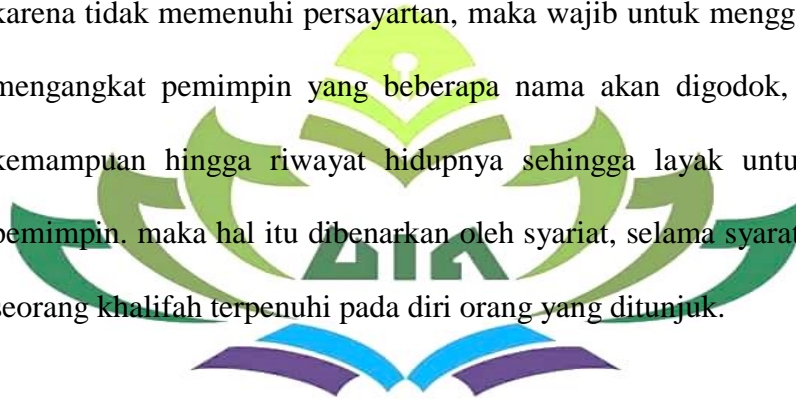
Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah Ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik (akibatnya). (Q.S An-Nisa : 59)

Ulil amri sendiri dalam Ayat tersebut adalah pemegang urusan pemerintahan, yakni para wali yang menjabat sebagai penguasa wilayah semacam wali kota, maupun gubernur, dan sama halnya apa yang menjadi keputusan Ketua KPU Lampung Timur Andri Oktavia harus dipatuhi dan menjadi ketetapan dan setiap warga Negara harus tunduk dan patuh dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tinjauan Fiqh Siyasah Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2015 apabila seorang Khlifah atau Imamah wafat atau dicopot dari jabatannya karena tidak memenuhi persyaratan, maka wajib untuk menggantikan atau mengangkat pemimpin yang beberapa nama akan digodok, akan dikaji kemampuan hingga riwayat hidupnya sehingga layak untuk dijadikan pemimpin. maka hal itu dibenarkan oleh syariat, selama syarat-syarat bagi seorang khalifah terpenuhi pada diri orang yang ditunjuk.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan urain yang telah penulis kemukakan dalam skripsi ini dapat disimpulkan menjadi beberapa poin yakni :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lampung Timur Nomor: 56/Kpts/KPU.Kab-008.435605/2015 Tentang Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015. Diskualifikasi pasangan calon Kepala Daerah Erwin Arifin dan Priyo Budi Utomo, dalam hal ini sudah sesuai yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 9 Tahun 2015 Pasal 83 ayat (1) dan (2).
2. Dalam tinjauan Fiqh Siyasah implementasi diskualifikasi calon Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2015 apabila seorang Khalifah atau Imamah wafat atau dicopot dari jabatannya karena tidak memenuhi persyaratan, maka wajib untuk menggantikan atau mengangkat pemimpin yang memenuhi persyaratan, dalam hal ini antara Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 pasal 54 ayat (1) dan (5) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 pasal 83 ayat (1) dan (2), Sesuai atau memiliki

persamaan yaitu sama-sama diperintahkan untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri apa yang telah menjadi keputusannya.

B. Saran

1. Kepada KPU Lampung Timur perlunya mensosialisasikan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilu agar tidak terulang kembali permasalahan seperti ini.
2. Kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati agar tunduk dan patuh kepada Peraturan dan Undang-Undang yang telah ditetapkan.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan perlu pemahaman yang mendalam guna memperoleh pemahaman terhadap ide-ide dan dalam mengeksplorasi pelaksanaan diskualifikasi calon kepala daerah bahkan beberapa tema lainnya yang menarik untuk dikaji.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman H.I, *Sistem Politik di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.
- A. Ubaidillah dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta Press, 2000.
- Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung: Problema dan Prospek*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Badriyatim, *Sejarah Peradaban Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Cholid Narbuto, *Metode Penelitian Bumi Aksara*, Jakarta, 2013.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Penerbit Diponegoro, Bandung, 2009.
- EK. Imam Munawir, *Asas – Asas Kepemimpinan dalam Islam*, Surabaya; Usaha Nasional, 2003.
- Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.
- H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Hartuti Purwaneni, *Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 3, 2004.
- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Ed.
- Ibnu Tricahyo, “*Reformasi Pemilu, Menuju Pemisahan Pemilu Nasional & Lokal. PT.In-Trans Publishing*”
- Ichtiar Baru van Hoeva, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet 1, Jakarta, 1996.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Cet III, 1997.

K.H. Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung S.Si, MM, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta; Gema Insani Perss, 2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta; Balai Pustaka, 2001.

Muhammad Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Muhammad Abu Zahra, *prospek hukum islam dalam system hokum Indonesia* (jurnal Al-'Adalah Vol. XIV, No.2 (2007) *Usul Al-Fiqh* (Cairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 55. Al-'Adalah by <http://ejournal.radenintan.ac.id/>, (03 febuari 2019, 15:35)

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Erlangga, 2008.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta ; Universitas Indonesia Press. 1990.

M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta; Gema Insani Perss, 2001.

Muchtar Affandi, *ilmu-ilmu kenegaraan*, Alumni : Bandung, 1971.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016 .

Margono *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2004.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008.

Peter Salim Dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1999.

Ni"Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas (pemilu legaslatif)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, Jakarta, Gozian Press, 2013.

Siti Mahmudah. S.Ag., M.Ag, *Sejarah Peradaban Islam*, Fakultas Syariah IAIN raden Intan Lampung.

Sayuti Pulungan *Hukum Tata Negara Islam*, Jakarta : Rajawali, 1997.

SU. J. Kaloh, *Demokrasi dan Kearifan Lokal pada Pilkada Langsung*, Jakarta : Kata Hasta Pustaka, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Sugiarto, dkk, *Tekhnik Sampling*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Suharsini Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.

Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Eresco, Bandung 1971.

Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*

PP No. 6/2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadai Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan wakil Walikota.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

<http://kpu-lampungtimurkab.go.id/> diakses Tanggal 30 November 2018 Pukul 13.00

<https://lampung.antarane.ws.com/berita/286001/akhirnya-pencalonan-erwin-arifin-gugur>

<https://www.merdeka.com/politik/digugurkan-karena-wakilnya-meninggal-cabup-lampung-timur-meradang.html>

[https://id.m.wikipedia.org/pemilihan kepala daerah diIndonesia](https://id.m.wikipedia.org/pemilihan_kepala_daerah_diIndonesia). Diakses pada tanggal 6 Desember 2018, Pukul 23.25 WIB



PANDUAN WAWANCARA

a. Identitas Responden :

1. Nama :
2. Umur :
3. Jabatan :

b. Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana menurut bapak tentang kebijakan terhadap diskulifikasi pasangan calon bupati nomor urut 3 ?
2. Apa dasar hukum terhadap diskulifikasi pasangan calon bupati nomor urut 3 ?
3. Bagaimana putusan penetapan gugurnya pasangan calon bupati nomor urut 3 ?
4. Apakah diskualifikasi pasangan calon bupati nomor urut 3 sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan komisi pemilihan umum ?
5. Apakah tujuan diskualifikasi pasangan calon bupati nomor urut 3 ?
6. Apakah sebab terjadinya diskualifikasi kepada pasangancalon bupati nomor urut 3 ?
7. Bagaimana mekanisme putusan KPU Lampung Timur terhadap pendiskualifikasian pasangan calon bupati nomor urut 3 ?